

THE STRATEGY TO BUILD FOOD SECURITY AND POVERTY ALLEVIATION BASED ON VILLAGE FOOD RESILIENCE

Hadi Sasana *); Dul Muid *)

**) Faculty of Economics and Business, Diponegoro University Semarang*

Abstract

Upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan dan mengurangi kemiskinan dilakukan secara bertahap melalui proses pemberdayaan masyarakat untuk mengetahui potensi dan kemampuan mereka. Selanjutnya, mereka harus menemukan probabilitas alternatif dan pemecahan masalah; untuk mengelola dan mengeksplorasi sumber daya secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Program Ketahanan Pangan Desa (Demapan) pada tingkat pendapatan masyarakat. Kedua, membuat strategi untuk membangun ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan berdasarkan ketahanan pangan desa. Lokasi penelitian adalah Desa Tanjungrejo. di Kabupaten Jekulo Kabupaten Kudus sebagai penerima manfaat Program Demapan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dalam statistik deskriptif dan Proses Hirarki Analog (AHP) menggunakan pilihan yang lebih baik 2000.

Temuan penelitian ini: 1). Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk desa untuk mendapatkan dukungan Demapan. 2). Mekanisme pelaksanaan Demapan di Desa Tanjungrejo dilakukan secara demokratis, dengan membuat kelompok, dan diawasi oleh departemen terkait. 3). Komunitas, berpartisipasi dalam Program Demapan; kelompok atau individu telah meningkatkan nilai aset dan pendapatan. 4). Strategi untuk membangun ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan berdasarkan Demapan, inpriority adalah: untuk meningkatkan modal, dorongan pemasaran, untuk membangun kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan lembaga, dan peningkatan infrastruktur.

Kata kunci: Ketahanan pangan desa, kemiskinan, ketahanan pangan, Analitic Hierarchy Process (AHP).

1. Latar Belakang

Upaya mewujudkan ketahanan pangan dilakukan secara bertahap melalui proses pemberdayaan masyarakat, serta mencari alternatif peluang dan pemecahan masalah, untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Perwujudan pemberdayaan masyarakat dalam rangka kemandirian pangan, dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat miskin dan rawan pangan di perdesaan. Upaya pemberdayaan masyarakat miskin dapat dilakukan melalui jalur ganda/*twin track strategy*, yaitu: (1) membangun ekonomi berbasis pertanian dan perdesaan untuk menyediakan lapangan kerja dan pendapatan; dan (2) mencukupi kebutuhan pangan bagi kelompok masyarakat miskin di daerah rawan pangan melalui pemberdayaan dan pemberian bantuan langsung.

Sejak tahun 2006, Badan Ketahanan Pangan (BKP) melaksanakan kedua strategi tersebut melalui kegiatan Desa Mandiri Pangan (Demapan). Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat desa dalam pengembangan usaha produktif berbasis

sumber daya lokal, peningkatan ketersediaan pangan, peningkatan daya beli dan akses pangan rumah tangga, sehingga dapat memenuhi kecukupan gizi rumah tangga. Selain itu, diharapkan berdampak terhadap penurunan kerawanan pangan dan gizi masyarakat miskin di pedesaan. Program Demapan memiliki tujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin pedesaan dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki secara optimal dalam mencapai kemandirian pangan.

Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus menjadi sasaran program desa mandiri pangan sejak tahun 2012. Sektor pertanian merupakan penyangga utama perekonomian masyarakat. Desa tersebut menjadi sasaran program desa mandiri pangan, karena selama ini desa tersebut dianggap belum masuk kategori mandiri pangan, sehingga perlu dibantu berupa dana, pembinaan, pelatihan, bimbingan konseling, dan pemasaran. Tujuan dari studi ini adalah: a). Mengetahui mekanisme penentuan penerimaan program Demapan dan dampaknya terhadap pendapatan masyarakat. b). Menentukan strategi membangun ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan berbasis desa mandiri pangan.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Teori dan Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat mempunyai rumusan yang berbeda-beda dalam berbagai konteks dan bidang studi, belum ada definisi yang tegas mengenai konsep tersebut. Menurut Sumodiningrat (2005) “pemberdayaan” berasal dari kata “memberi daya” atau “memberi energi”. Pemberdayaan lebih tepat diartikan sebagai “memberi energi” yang lebih bersifat positif karena bersifat netral namun diperlukan. Pemberdayaan adalah memberikan energi agar yang bersangkutan mampu untuk bergerak secara mandiri. Pemberdayaan hanya bersifat sementara, sampai objek mampu untuk mandiri, meski perlu dipantau agar tidak terjatuh lagi.

Menurut Edi Suharto (2005) pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan atau lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan, (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan, dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka. Dari dua pendapat di atas maka dapat disimpulkan secara sederhana bahwa pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya untuk memberikan energi atau daya kepada masyarakat, khususnya masyarakat yang rentan atau lemah yang ditujukan agar masyarakat tersebut bisa mengakses seluas-luasnya yang menjadi haknya demi tercapainya suatu kondisi sosial, ekonomi, dan kualitas kehidupan yang lebih baik.

2.2 Program Desa Mandiri Pangan (Demapan)

Desa yang disebut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Dalam buku Pedoman Umum Demapan, 2012:2). Desa-desa yang masih miskin dan kurang pangan sekarang banyak dibentuk program aksi desa mandiri pangan dalam

rangka pembentukan ketahanan pangan. Mandiri pangan sendiri diartikan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan yang dapat dicukupi oleh kemampuan sumberdaya yang dimiliki, dilihat dari bekerjanya subsistem ketersediaan, subsistem distribusi dan subsistem konsumsi pangan. Menurut Pedoman Umum Demapan (2012:2) desa mandiri pangan adalah desa/kelurahan yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi melalui pengembangan subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumberdaya setempat secara berkelanjutan.

Program desa mandiri pangan dapat dilakukan melalui pemberdayaan masyarakat desa, pembentukan kelompok tani dan afinitas, posdaya, lembaga keuangan desa, dan tim pangan desa. Program aksi desa mandiri pangan adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi sehingga dapat menjalani hidup sehat dan produktif dari hari kehari, melalui pengembangan sistem ketahanan pangan yang meliputi subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan subsistem konsumsi dengan memanfaatkan sumber daya setempat secara berkelanjutan (Pedoman Umum Demapan, 2012). Jadi pengertian desa mandiri pangan secara garis besar adalah salah satu strategi untuk mempercepat pembangunan di perdesaan, khususnya dalam memantapkan ketahanan pangan. Kegiatannya lintas sektoral dan pelaksanaannya memerlukan keterlibatan serta sinergitas antar instansi dan stakeholder terkait. Kegiatan desa mandiri pangan dilaksanakan di desa-desa terpilih yang mempunyai rumah tangga miskin dan beresiko rawan pangan dan gizi, dasar pemilihannya adalah desa rawan pangan dengan jumlah rumah tangga miskin lebih dari 30 % dari jumlah KK berdasarkan hasil survei Data Dasar Rumah Tangga (DDRT). Prinsip Pengembangan model desa mandiri pangan (Naiggolan, 2007) adalah sebagai berikut :

1. Kemampuan pengelolaan ketahanan pangan di tingkat desa.
2. Kemampuan upaya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan kualitas pemenuhan kebutuhan pangan.
3. Kemampuan menangani masalah kelebihan atau kekurangan pangan dan ketidakmampuan masyarakat dalam mengakses pangan.
4. Prinsip-prinsip pemberdayaan ketahanan pangan secara partisipatif dan berkelanjutan.

2.3. Ketahanan pangan

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012). Pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling esensial bagi manusia untuk mempertahankan hidup dan kehidupan (Karsin, 2004).

Pangan sebagai sumber zat gizi (karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral dan air) menjadi landasan utama manusia untuk mencapai kesehatan dan kesejahteraan sepanjang siklus kehidupan. Kelangkaan pangan dan kebiasaan bekerja dari keluarga, berpengaruh pula terhadap pola makanan (Harper, et.al, 1986). Ada beberapa hal penting dalam mengatasi permasalahan pangan di Indonesia (Purwaningsih, 2008) yaitu :

1. Ketersediaan pangan
2. Kemandirian pangan
3. Keterjangkauan pangan
4. Konsumsi pangan

Ketersediaan pangan dapat diwujudkan melalui proses kedaulatan pangan dan peng-
anekaragaman pangan. Pemenuhan kebutuhan pangan merupakan hak negara dan bangsa
yang secara mandiri menentukan kebijakan Pangan yang menjamin hak atas Pangan bagi
rakyat dan yang memberikan hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem pangan yang
sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Secara umum ketahanan pangan menurut Hanani
(2009) dalam (Purwaningsih, 2011), kondisi ketika semua orang pada segala waktu secara
fisik, sosial, dan ekonomi memiliki akses pada pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk
pemenuhan kebutuhan konsumsi dan sesuai dengan selera (food preferences) demi kehi-
dupan yang aktif dan sehat.

Adanya ketahanan pangan maka diharapkan masyarakat dapat mewujudkan kemandirian pangan, dimana arti kemandirian pangan itu sendiri. Strategi yang diterapkan dalam rangka keberhasilan pembangunan ketahanan pangan (Hanafie, 2010: 275) adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan daya beli masyarakat miskin dengan menaikkan tingkat produksi pangan secara keseluruhan. Peningkatan supply pangan dan daya beli masyarakat merupakan hal yang tidak mudah karena terkait dengan kebijakan yang akan dilakukan oleh suatu negara.
2. Pendistribusian kembali supply pangan dari daerah ke daerah defisit pangan dengan menggunakan mekanisme yang dapat meningkatkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat miskin yang kekurangan pangan, selain menaikkan insentif untuk meningkatkan produksi pangan dalam jangka panjang.

3. Metode Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Tanjungrejo, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, lokasi penelitian merupakan desa yang mendapat dan melaksanakan program Desa Mandiri Pangan sejak tahun 2012. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden dan para *key person* melalui penyebaran kuisisioner dan *indept interview*. Data sekunder diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan dinas terkait di Kabupaten Kudus..

Metode sampling dilakukan dengan cara *purposive sampling* dimana responden sebagai pihak perencana, leader dan kelompok kerja. Responden yang dipilih adalah orang yang berkompeten dengan tema penelitian meliputi :akademisi, pelaku Demapan, pemerintah daerah, dan tokoh masyarakat.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan secara deskriptif dari data yang diperoleh untuk mengetahui pelaksanaan program desa mandiri pangan. Analisis kuantitatif dengan statistik induktif dan *Analtic Hierarchy Process (AHP)*.

4. Hasil dan Pembahasan

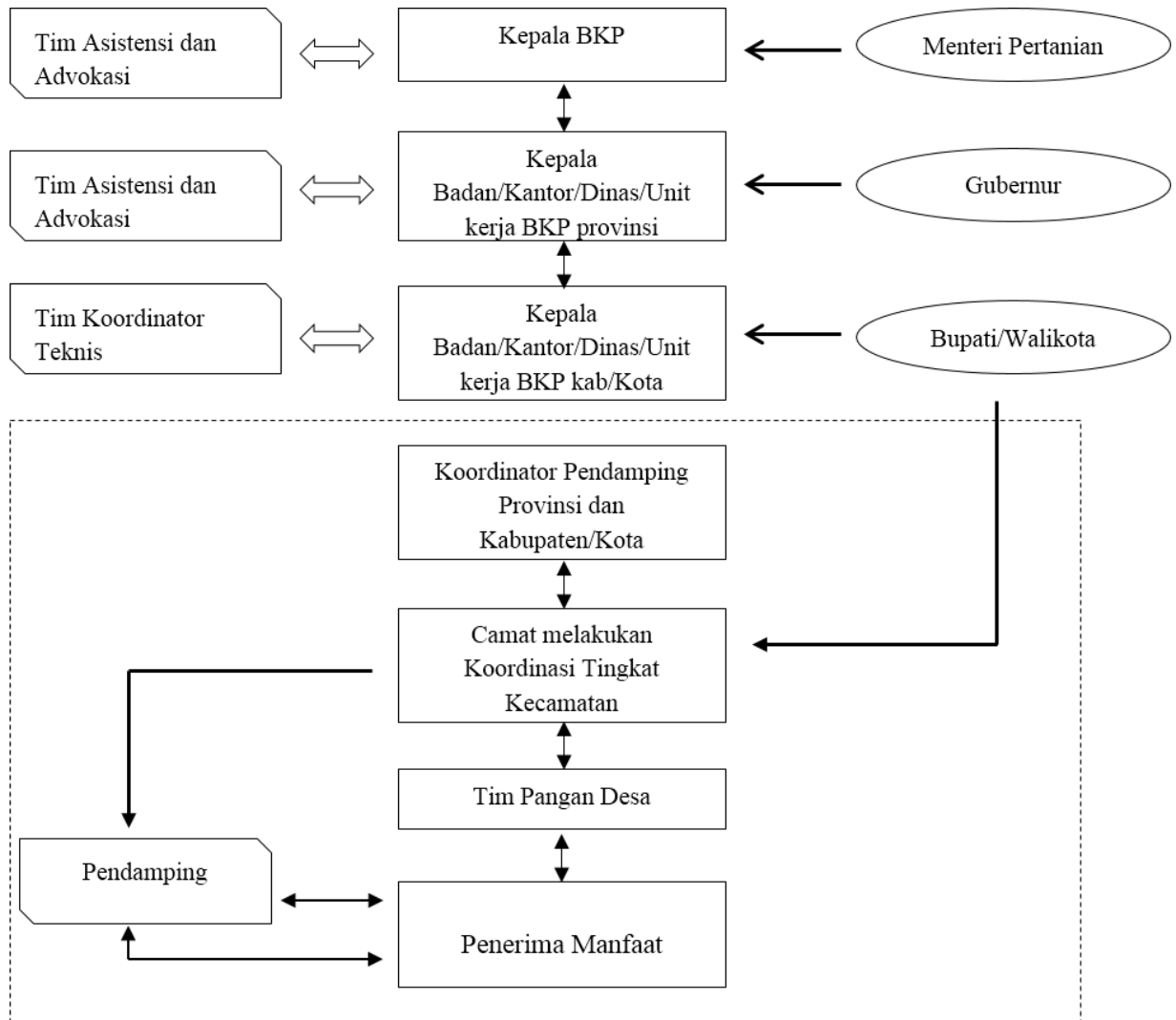
4.1 Mekanisme Penentuan Desa Penerima Program Desa Mandiri Pangan

Desa Tanjungrejo merupakan salah satu desa di Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus, memiliki luas wilayah 730,49 Ha. Terdiri atas 3 dusun yaitu Dusun Patihan, Dusun Beji, dan Dusun Kedungmojo. Kondisi wilayah didominasi oleh persawahan, pemukiman, dan perkebunan. Potensi utama sumber daya alam adalah di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan dan peternakan, tetapi belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat secara masif

Program Demapan merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki secara optimal guna mencapai kemandirian pangan melalui bantuan yang diberikan oleh pemerintah lewat Badan Ketahanan Pangan (BKP) kepada masyarakat miskin di pedesaan. Ada beberapa syarat suatu desa mendapatkan bantuan desa mandiri pangan; pertama, suatu desa harus memiliki jumlah kepala keluarga (KK) miskin lebih dari 30% dari total seluruh KK. Kedua, kondisi rawan pangan yang disebabkan rendahnya akses pangan dan daya beli masyarakat yang masih rendah.

Program desa mandiri pangan dirumuskan oleh kelompok kerja dari tingkat desa hingga tingkat pusat sebagai pelaksana program. Dana bantuan untuk mewujudkan desa mandiri pangan diterima oleh Pemerintah Desa Tanjungrejo sebesar Rp.100 juta. Dana tersebut kemudian disalurkan kepada empat kelompok di desa tersebut yaitu kelompok Bogomulyo, kelompok Sido Makmur, kelompok Rejo Mulyo dan kelompok Sido Maju. Pembagian dana dilakukan secara proporsional kepada tiap kelompok. Dari 4 kelompok yang ada, dana Rp.100 juta dibagi rata sebesar Rp.25 juta tiap kelompok. Apabila satu kelompok terdiri 10 anggota, maka rata-rata per anggota mendapatkan bantuan sebanyak Rp2,5 juta. Mekanisme penentuan desa penerima program Desa Mandiri Pangan (Demapan) disajikan dalam bagan alur sebagai berikut :

Gambar 1
 Bagan Alur Penentuan Desa Mandiri Pangan



4.2 Pelaksanaan Program Desa Mandiri Pangan

Bantuan program Demapan sangat bermanfaat bagi anggota kelompok di desa Tanjungrejo, terutama untuk permodalan. Fokus awal dalam memanfaatkan dana adalah untuk bidang peternakan dan pertanian. Para anggota yang mendapat bantuan sekitar Rp 2,5 juta untuk membeli anakan kambing lalu dibesarkan dan diperbanyak, sedangkan di bidang pertanian dana tersebut dapat dibelikan bibit dan pupuk.

Program Desa Mandiri Pangan pertama kali dilaksanakan di Desa Tanjungrejo pada tahun 2012. Program ini memiliki 4 tahapan pelaksanaan yaitu tahap persiapan, pertumbuhan, pengembangan, dan yang terakhir adalah tahap kemandirian. Satu tahapan memiliki periode waktu satu tahun, sehingga program desa mandiri pangan memiliki jangka waktu 4 tahun dari tahap persiapan hingga mencapai tujuannya yaitu kemandirian.

Perkembangan anggota program desa mandiri pangan di Desa Tanjungrejo dapat dilihat dari Tabel 1 di bawah ini:

Tabel 1
Perkembangan Program Desa Mandiri Pangan di Desa Tanjungrejo

Tahun	Tahap	Jumlah Kelompok	Jumlah Anggota
2012	I (Persiapan)	4	45
2013	II (Pertumbuhan)	4	48
2014	III (Pengembangan)	4	52
2015	IV (Kemandirian)	4	52

Sumber: Data primer, 2016 (diolah)

- Berdasarkan Tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 (tahap persiapan) hingga tahun 2015 (tahap kemandirian) jumlah kelompok yang tergabung dalam program desa mandiri pangan berjumlah 4 kelompok. Namun apabila dilihat berdasarkan jumlah anggota yang ikut berpartisipasi dalam program tersebut bertambah jumlahnya. Pemerintah melalui DKP dan Pemerintah Desa Tanjungrejo melakukan pendampingan dalam bentuk penyuluhan dan pelatihan dengan mengundang ahli dari lembaga-lembaga seperti dinas, perguruan tinggi, dan lain-lain

b. Perkembangan Nilai Aset

Berdasarkan data hasil survey dan wawancara di lapangan, secara keseluruhan selama 4 tahun program Demapan di Tanjungrejo mengalami peningkatan nilai aset. Pada tahun 2012 senilai Rp 100.000.000 menjadi Rp 133.260.677 di tahun 2015. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut.

Tabel 2
Peningkatan Aset 2012-2015

Kelompok	Jumlah Aset				
	Juni 2012 (Rp)	2012 (Rp)	2013 (Rp)	2014 (Rp)	2015 (Rp)
Bogomulyo	25.000.000	27.500.000	31.265.625	38.521.202	43.104.148
Rejomulyo	25.000.000	27.500.000	26.616.780	26.493.726	29.448.416
Sidomaju	25.000.000	27.500.000	24.856.294	25.095.652	26.426.860
Sidomakmur	25.000.000	27.500.000	28.206.567	32.131.210	34.281.253
TOTAL	100.000.000	110.000.000	110.945.266	122.241.789	133.260.677

Sumber : data primer, 2016 (diolah)

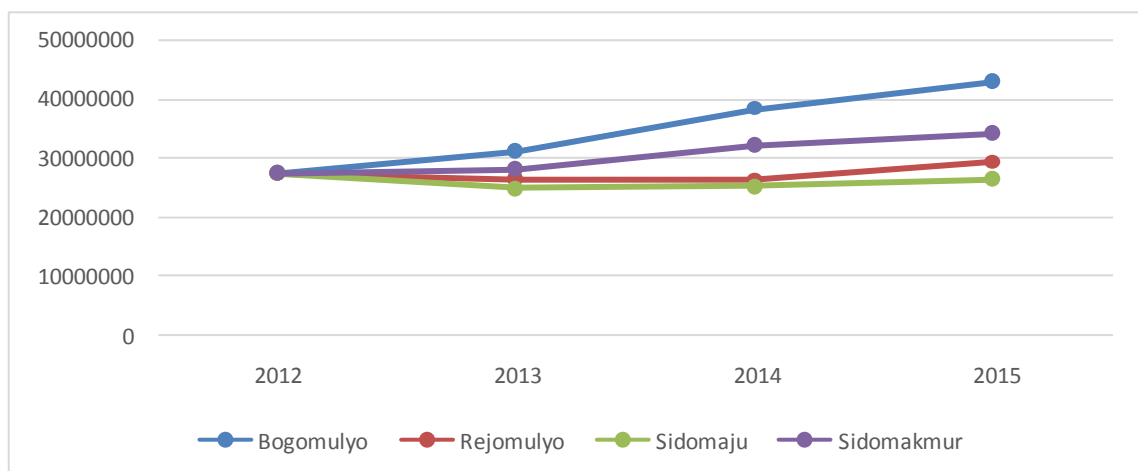
Dari empat kelompok penerima program Demapan, kelompok Bogomulyo merupakan kelompok yang paling cepat perkembangannya, baik secara aset maupun jumlah anggota kelompok. Hal ini dikarenakan sistem penyaluran dana ke anggota kelompok menggunakan

sistem simpan pinjam. Para anggota sifatnya meminjam dan wajib mengembalikan pinjaman beserta bunganya, sehingga kas kelompok Bogomulyo terbilang lancar. Berbeda dengan tiga kelompok lainnya (kelompok Rejomulyo, kelompok Sidomaju, dan kelompok Sidomakmur), para anggota yang menggunakan dana berkewajiban mengembalikan dana pokok dan bunganya apabila untung. Apabila mereka rugi maka hanya mengembalikan bunganya saja, sebagai contoh apabila ada anggota yang menggunakan dana untuk ternak kambing, jika kambingnya mati maka akan kehilangan kas yang cukup besar. Hal ini yang menyebabkan resiko kegagalan semakin besar.

Karena perbedaan sistem penyaluran itu menyebabkan perbedaan antusias para anggota dalam meminjam/menggunakan dana. Kelompok Bogomulyo dengan sistem simpan pinjam membuat para anggota berfikir matang-matang dalam meminjam dana, sehingga peminjam dana biasanya yang sudah ahli di bidang yang mau digelutinya. Kelompok Bogomulyo merupakan kelompok yang paling pesat perkembangan nilai asetnya disusul kelompok Sidomakmur, Kelompok Rejomulyo, dan Kelompok Sidomaju. Perkembangan aset tiap Kelompok penerima program Desa Mandiri Pangan Tanjungrejo 2012-2015 sebagai berikut:

Grafik 2

Perkembangan Aset tiap Kelompok Desa Mandiri Pangan Tanjungrejo 2012-2015



c. Perkembangan Pendapatan

Program Demapan bermanfaat bagi masyarakat miskin desa yang mengalami keterbatasan akses modal. Berdasarkan pengakuan para anggota kelompok penerima program Demapan, terjadi peningkatan pendapatan setelah ikut program desa mandiri pangan tersebut. Persentase peningkatan pendapatan rata-rata secara dapat dilihat pada Tabel 3 di bawah ini:

Tabel 3
Persentase Peningkatan Pendapatan Rata-rata Anggota Kelompok

Pendapatan rata-rata per bulan Sebelum Demapan	Penghasilan tambahan per bulan	Pendapatan rata-rata Per bulan Sesudah Demapan	Persentase Perubahan
Rp 1.725.000,00	Rp 333.000,00	Rp 2.058.000,00	19%

Sumber: Data primer, 2016 (diolah)

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa pendapatan rata-rata para anggota kelompok program desa mandiri pangan rata-rata mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp 2.050.000. Hal ini berarti terjadi kenaikan pendapatan rata-rata sebesar 19% setelah mengikuti program desa mandiri pangan. Berdasarkan uji beda untuk mengetahui dampak program Demapan di Desa Tanjungrejo, dengan uji-t berpasangan (*Paired T-Test*) adalah sebagai berikut :

Gambar 3
t-Test: Paired Two Sample for Means

	2012	2015
Mean	27832783.59	31952609
Variance	3.34325E+12	3.65E+13
Observations	48	48
Pearson Correlation	0.568721209	
Hypothesized Mean Difference	0	
Df	47	
t Stat	-5.468347828	
P(T<=t) one-tail	8.49819E-07	
t Critical one-tail	1.677926722	
P(T<=t) two-tail	1.69964E-06	
t Critical two-tail	2.011740514	

Sumber : Ms. Excel 2010, 2016 (diolah)

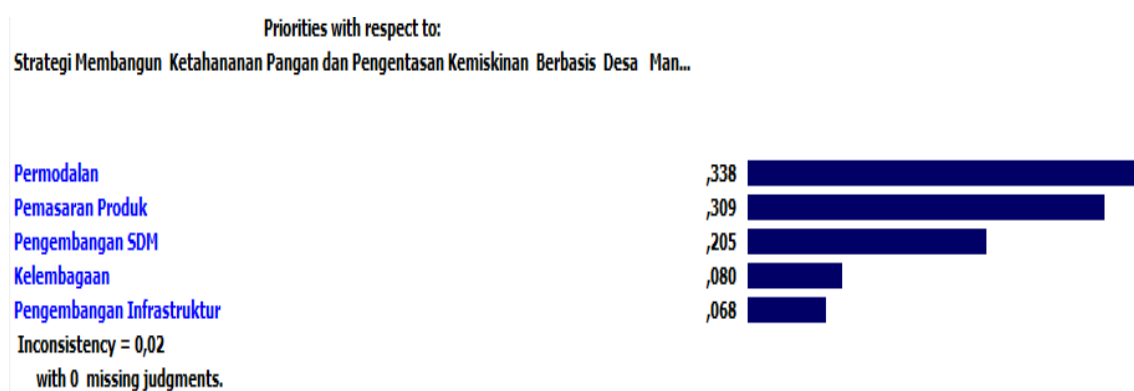
Berdasarkan hasil uji t-test maka disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pendapatan anggota dengan adanya program Desa mandiri Pangan di Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus.

4.3.4 Strategi Membangun Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan Berbasis Desa Mandiri Pangan

Berdasarkan kondisi obyektif di lapangan dan *indept interview* dengan para pelaku serta pihak-pihak yang berkompeten (akademisi, pemerintah, dan tokoh masyarakat), strategi pengembangan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan meliputi empat aspek utama yaitu : pengembangan sumber daya manusia, berbasis program Demapan terdapat beberapa aspek penting sebagai strategi utama membangun ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Hasil analisis aspek aspek utama dapat dilihat pada Gambar 4 berikut :

Gambar 4

Analisis Aspek Utama dalam Pengembangan Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan Berbasis Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Kudus.



Sumber: Data primer, 2016 (diolah)

Berdasarkan Gambar 4 di atas, dapat dilihat bahwa urutan aspek utama yang menjadi prioritas menurut *key person* berturut-turut yaitu: 1). aspek permodalan dengan angka sebesar 33,8%, 2). aspek pemasaran dengan angka sebesar 30,9%, 3). pengembangan SDM dengan angka sebesar 20,5%, 4) aspek kelembagaan dengan angka sebesar 8,0%, kemudian yang terakhir adalah 5) aspek infrastruktur sebesar 6,8%.

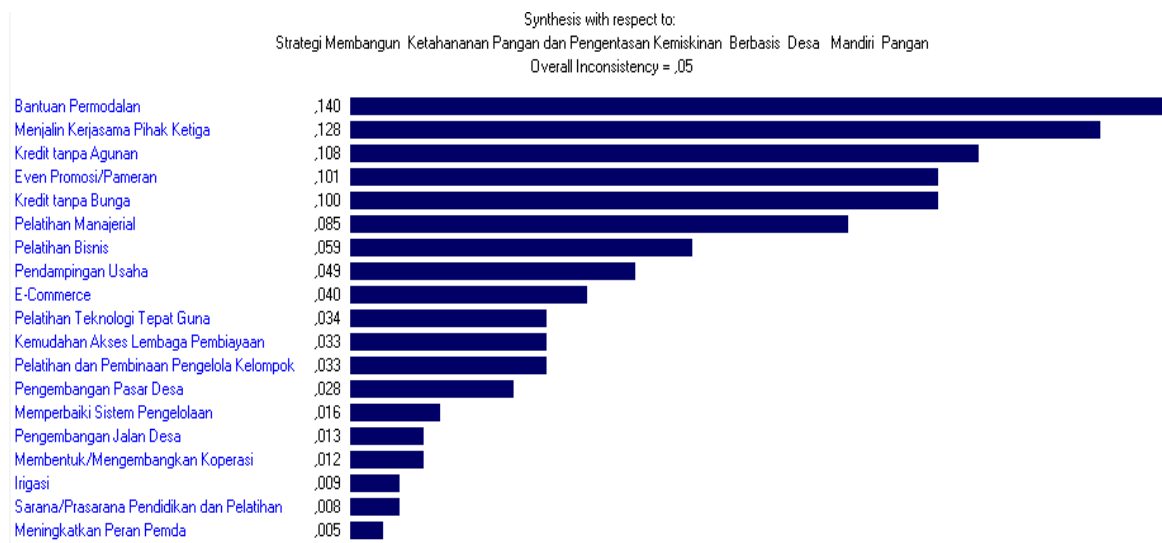
- a. Aspek permodalan. Aspek permodalan menjadi paling penting dikarenakan sasaran utama program desa mandiri pangan adalah keluarga tidak mampu, sehingga ketersediaan modal mutlak diperlukan.
- b. Aspek pemasaran produk. Menurut responden *key person* salah satu persoalan yang sering terjadi dalam industri primer pangan adalah persoalan fluktuasi harga produk pangan terutama saat musim panen raya yang sering merugikan petani. Sistem pemasaran yang transparan dan baik diperlukan guna menciptakan harga transaksi yang wajar dan adil.
- c. Aspek pengembangan kemampuan SDM. Salah satu ciri yang umum dalam usaha tani di Indonesia adalah masih tradisional atau bersifat subsisten, sehingga usaha tani sulit berkembang. Berdasarkan hasil diskusi dengan *key person* diperoleh informasi bahwa kemampuan SDM dalam mengelola usaha tani perlu ditingkatkan untuk keberlanjutan usaha tani dan manfaat ekonomi yang akan diperoleh oleh petani tersebut.

- d. Aspek kelembagaan. Aspek kelembagaan menjadi wadah bagi para pelaku usaha tani untuk berkoordinasi terkait pengembangan usaha tani.
- e. Aspek infrastruktur fisik. Aspek infrastruktur fisik merupakan aspek vital untuk mendukung kelancaran usaha-usaha kemandirian pangan, namun berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi di daerah penelitian kondisi infrastruktur fisik sudah cukup baik sehingga prioritas pengembangannya berada setelah prioritas lainnya.

Selanjutnya dilakukan analisis prioritas substrategi atau strategi kebijakan secara menyeluruh berdasarkan aspek dan alternatif kebijakan. Tiga urutan prioritas strategi kebijakan teratas menurut para responden secara berurutan adalah: 1). Bantuan permodalan dengan angka sebesar 14,0%, 2). melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dengan angka sebesar 12,0%, dan 3). pemberian kredit tanpa agunan dengan angka sebesar 10,3%. Hasil analisis prioritas secara menyeluruh menurut responden *key person* dapat dilihat pada Gambar 4.10 di bawah ini:

Gambar 4.10

Analisis Prioritas Strategi Kebijakan dalam Pengembangan Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan Berbasis Desa Mandiri Pangan di Kabupaten Kudus



Sumber: Data primer, 2016 (diolah)

Prioritas pertama dalam pengembangan desa mandiri pangan adalah bantuan permodalan, hal ini karena sasaran dari program adalah keluarga miskin sehingga pemberian modal merupakan prioritas pertama. Prioritas strategi kedua dalam mewujudkan program desa mandiri pangan adalah menjalin kerjasama pemasaran dengan pihak ketiga. Kerjasama pemasaran diharapkan mampu menjamin keberlangsungan usaha-usaha terkait kemandirian pangan dan mampu memberikan kepastian bagi pelaku usaha terkait penjualan produk hasil usahanya.

Prioritas strategi kebijakan ketiga dalam pengembangan program desa mandiri pangan adalah kredit modal tanpa agunan. Kredit tanpa agunan menjadi rekomendasi strategi oleh para *key person* dikarenakan pemberian kredit modal dapat meningkatkan kemampuan produksi usaha. Pada sisi lain masyarakat sasaran program desa mandiri pangan masih enggan

untuk mengakses kredit dikarenakan ketiadaan aset untuk agunan kredit maupun ketika terdapat aset agunan, masyarakat cenderung enggan menjadikan asetnya menjadi agunan kredit, sehingga program kredit tanpa agunan sangat diperlukan untuk pengembangan program desa mandiri pangan.

5. Penutup

Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bagian sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Syarat agar suatu desa mendapatkan bantuan Desa Mandiri Pangan, yang pertama, suatu desa harus memiliki jumlah kepala keluarga (KK) miskin lebih dari 30% dari total seluruh KK. Kedua, kondisi rawan pangan yang disebabkan rendahnya akses pangan, dan daya beli masyarakat yang masih rendah.
2. Program desa mandiri pangan dirumuskan oleh kelompok kerja dari tingkat desa hingga tingkat pusat sebagai pelaksana program. Dana bantuan untuk mewujudkan desa mandiri pangan diterima oleh Pemerintah Desa Tanjungrejo sebesar Rp100 juta.
3. Program Desa Mandiri Pangan memberikan perbedaan yang signifikan dari tahun ke tahun terhadap nilai aset yang dimiliki kelompok-kelompok Demapan Tanjungrejo. Pada tahun 2013 rata-rata asetnya adalah Rp 27.832.784 sedangkan pada tahun 2015 menjadi Rp 31.952.609, sehingga ada peningkatan aset rata-rata senilai Rp 4.119.826,00 atau sekitar 15%.
4. Secara individu terjadi peningkatan rata-rata pendapatan anggota peserta program Desa Mandiri Pangan Tanjungrejo. Sebelum ada Demapan pendapatan mereka rata-rata Rp 1.725.000 per bulan, setelah menjadi anggota Demapan rata-rata menjadi Rp 2.058.000 per bulan, meningkat sekitar 19%.
5. Strategi yang perlu dikembangkan dalam pengembangan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan berbasis desa mandiri pangan di Desa Tanjungrejo Kabupaten Kudus, berdasarkan skala prioritas adalah : a).Aspek permodalan. b). Aspek pemasaran produk. c). Aspek pengembangan kemampuan SDM. d).Aspek kelembagaan. e). Aspek kelembagaan menjadi wadah bagi para pelaku usaha tani untuk berkoordinasi terkait pengembangan usaha tani. e). Aspek infrastruktur fisik pendukung usaha-usaha terkait kemandirian pangan.

Berdasarkan temuan dan kesimpulan peneliti memberikan masukan kepada pemerintah daerah sebagai berikut:

- a. Pemerintah tidak hanya memberikan bantuan permodalan saja tetapi diiringi oleh pelatihan dan pendampingan, sehingga para anggota Demapan bisa cakap dalam menggunakan permodalan.
- b. Kelompok Demapan harus lebih selektif dalam memberi atau meminjamkan modal. Harus dipilih orang-orang yang sudah berpengalaman atau berkompeten di bidang usaha yang mau dijalankan, agar memperkecil resiko kerugian.
- c. Perlu dibuat lembaga seperti koperasi yang memiliki badan hukum, agar memudahkan dalam melakukan perluasan pemasaran maupun permodalan terutama perbankan, sehingga kelompok-kelompok Demapan dapat berkembang lebih pesat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirian, Dkk. 2008. "Ketahanan Pangan Rumah Tangga Petani Sawah Di Wilayah Enclave taman Nasional Bukit Barisan Selatan". *Jurnal Gizi dan Pangan*,
- Anonim. 2012. Pedoman Umum Program Aksi Desa Mandiri Pangan (Desa Mandiri Pangan). Badan Ketahanan Pangan Badan Ketahanan Pangan, Dep. Pertanian RI. Jakarta.
- Anonim. 2013. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pengembangan dan Pembinaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah.
- Anonim. 2012. Undang-undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
- Arif Setyawan,(2010) Karakteristik Sosial-Demografi dan Tingkat Pendapatan Pemulung di TPA Tanjungrejo Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus. Under Graduates. *Thesis*, Universitas Negeri Semarang.
- Daniel, Moehar. 2004. *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Fathonah, dan Prasodjo. 2011. "Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga Yang dikepalai Pria Dan rumah Tangga Yang Dikepalai Wanita". *Jurnal Ilmiah Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*.
- Hanafie, R. (2010). *Pengantar Ekonomi Pertanian*. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Hanani, Nuhfil. (2009). "Ketahanan Pangan: Sub Sistem Ketersediaan, Makalah Workshop I Ketahanan Pangan di Wilayah Jawa Timur, 2009". Fakultas Pertanian Jurusan Ekonomi Pertanian Universitas Brawijaya. Malang.
- Hasan. 2000. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hidayat dan Nugraha. 2011."Progam Aksi Desa Mandiri Pangan (Proses pelaksanaan dan dampaknya terhadap kondisi sosial ekonomi rumah tangga miskin di desa Tamanasri, Kabupaten Pacitan)". *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*. Jurnal Ilmiah Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Universitas Brawijaya Malang Volume XXII,Nomor 2,Agustus 2011.
- Husinsyah. 2008."Dampak Program Desa Mandiri Pangan Terhadap Tingkat Ketahanan Pangan Masyarakat Di Desa Birang Kec. Gunung Tabur Kabupaten Berau". *Jurnal Ilmu Ekonomi Pertanian*. Jurnal Ilmiah Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Samarinda, Volume 6, Nomor 2, 2008.
- Ilham, Nyak dan Bonar M. Sinaga. 2007."Penggunaan Pangsa Pengeluaran Pangan Sebagai Indikator Komposit Ketahanan Pangan". SOCA, *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*. Fakultas Pertanian Universitas Udayana. Volume 7 Nomor 3:213-328 November 2007.
- Nainggolan, Kaman. 2007. Membangun Kemandirian Pangan Berbasis Pedesaan. <http://www.sinarharapan.co.id>. Diakses tanggal 5 September 2014.
- Purwaningsih. 2008."Ketahanan Pangan: Situasi, Permasalahan, Kebijakan, Dan Pemberdayaan Masyarakat". *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*. Jurnal Ilmiah

FE Universitas Muhamadiyah Surakarta, Terakreditasi Dikti No. 55a/DIKTI/Kep 2006, Volume 9, Nomor 1, Juni 2008.

- Purwaningsih, Dkk. 2010. "Analisis Permintaan Pangan rumah Tangga Menurut Tingkat Ketahanan Pangan Di Provinsi Jawa Tengah (analisis data susenas 2008)". *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*. Jurnal Eko-Regional FEUNSOED, Volume 5, Nomor 1, Maret 2010.
- Purwaningsih, Dkk. 2010."Pola Pengeluaran Pangan Rumah Tangga Menurut Tingkat Ketahanan Pangan Di Provinsi Jawa Tengah". *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*. Jurnal Ilmiah FE UNS Surakarta, Terakreditasi Dikti No. 51/DIKTI/Kep 2010, Volume 11, Nomor 2, Desember 2010.
- Purwaningsih, Dkk. 2011."Analisis Identifikasi Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009". *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan*. Jurnal Ilmiah FE UNS Surakarta, Volume 11, Nomor 1, 2011.
- Rosyadi dan Purnomo. 2012."Tingkat Ketahanan Pangan Rumah Tangga di Desa Tertinggal. *Jurnal Ilmu Ekonomi Pembangunan*. *Jurusan Ekonomi Pembangunan*. Fakultas Ekonomi UMS.Surakarta.
- Sianipar, dkk. 2012."Analisis Ketahanan Pangan Rumah Tangga Tani Di Kabupaten Manokwari". *Jurnal Ilmiah Jurusan Ekonomi Pertanian*. Fakultas Ekonomi UGM Yogyakarta, Volume 8, Nomor 2, Februari 2012.
- Sukandar, dkk. 2006."Studi Ketahanan Pangan Pada Rumah Tangga Miskin dan Tidak Miskin". *Jurnal Ilmiah Gizi Masyarakat*. FEMA IPB Bogor.
- Yayasan Pembinaan dan Pengembangan Swadaya Sinode GKMI Jl. Baru 264-C, Kudus
ypps@plasa.com